



BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini, perhatian atas perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi fokus perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran, karena bagaimanapun juga ketersediaan dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari perkembangan dan prospek perekonomian Kabupaten Lombok Barat ke depan.

Beberapa indikator makro ekonomi yang dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian dan perubahan berkaitan dengan APBD antara lain pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian. Indikator-indikator makro tersebut sebagai alat ukur secara langsung terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan direalisasikan baik secara simultan maupun secara parsial oleh masing-masing SKPD.

Untuk mendukung kesinambungan dan pencapaian berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, harus diadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama berkaitan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan perekonomian suatu daerah baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Untuk kepentingan berbagai analisis ekonomi makro masing-masing daerah, pada umumnya PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) suatu tahun dasar (tahun 2000). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui besarnya pergerakan harga.

Pada tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lombok Barat diperkirakan mencapai Rp 4,86 triliun lebih atau tumbuh sebesar 11,48%, mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya. Sementara itu untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,16% yaitu dari Rp 1,87 triliun lebih pada tahun 2011 menjadi Rp 1,96 triliun lebih pada tahun 2012, seperti terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2010 – 2012

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)	
		ADHB	ADHK 2000	ADHB	ADHK 2000
1	2	3	4	5	6
1	2010	3.948.119,72	1.770.789,54	10,77	4,78
2	2011*)	4.393.825,55	1.869.645,39	11,29	5,58
3	2012**)	4,867,277.96	1,963,357.74	11,48	5,16

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

2.1.2. Struktur Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Lombok Barat dibentuk dari beberapa sektor yang memiliki peranan vital yang tercermin dari PDRB yang dihasilkan. Untuk melihat peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.2.

Nilai dan Distribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2012

No	Sektor	2010		2011*)		2012**)	
		Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
1	2	7	8	9	10	11	12
I	Primer	1.195.754,66	30,28	1.270.536,42	28,92	1.416.377,89	29,10
1	Pertanian	1.037.722,70	26,28	1.083.528,91	24,66	1.173.500,72	24,11
2	Pertambangan dan Galian	158.031,96	4,00	187.007,51	4,26	242.877,17	4,99
II	Sekunder	629.930,23	15,96	732.438,70	16,67	901.906,61	18,53
1	Industri Pengolahan	145.610,80	3,69	159.895,15	3,64	177.655,65	3,65
2	Listrik, Gas dan Air Bersih	29.686,40	0,75	33.259,80	0,76	38.451,50	0,79
3	Bangunan	454.633,03	11,52	539.283,75	12,27	685.799,46	14,09
III	Tersier	2.122.434,84	53,76	2.390.850,42	54,41	2.548.993,47	52,37
1	Perdagangan, Hotel dan Restoran	882.686,55	22,36	1.007.059,53	22,92	1.136.022,68	23,34
2	Pengangkutan dan Komunikasi	442.476,64	11,21	483.407,35	11,00	521.772,20	10,72
3	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	161.028,57	4,08	187.413,74	4,27	199.071,67	4,09
4	Jasa-Jasa	636.243,08	16,12	712.969,80	16,22	692.126,93	14,22
	PDRB	3.948.119,72	100,00	4.393.825,55	100,00	4.867.277,96	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2010 – 2012 Nilai PDRB ADHB Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan pada Tahun 2012 mencapai 4,86 Triliun Rupiah lebih, dimana sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan pembentuk PDRB yakni sebesar 24,11% dan 23,34%.

Tabel 2.3

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2012

No	Sektor	2010		2011*)		2012**)	
		Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
1	2	7	8	9	10	11	12
I	Primer	495,906.25	28.00	512,669.31	27.42	541.565,89	27,58
1	Pertanian	422,798.50	23.88	432,054.35	23.11	447.506,43	22,79
2	Pertambangan dan Galian	73,107.75	4.13	80,614.96	4.31	94.059,46	4,79
II	Sekunder	319,526.40	18.04	345,689.79	18.49	369.727,04	18,83
1	Industri Pengolahan	93,592.67	5.29	97,934.43	5.24	104.681,06	5,33
2	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,854.39	0.56	10,613.49	0.57	11.141,70	0,57
3	Bangunan	216,079.34	12.20	237,141.87	12.68	253.904,27	12,93
III	Tersier	955,356.89	53.95	1,011,286.30	54.09	1.052.064,81	53,58
1	Perdagangan, Hotel dan Restoran	434,483.79	24.54	466,476.97	24.95	496.476,95	25,29
2	Pengangkutan dan Komunikasi	188,940.27	10.67	199,723.41	10.68	200.975,33	10,24
3	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	78,841.40	4.45	84,405.72	4.51	87.878,60	4.48
4	Jasa-Jasa	253,091.43	14.29	260,680.20	13.94	266.733,93	13,59
	PDRB	1.770.789.54	100,00	1.869.645.39	100,00	1.963.357,74	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2010 – 2012 juga mengalami trend peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 2.3. Dimana pada Tahun 2012 nilai PDRB mencapai 1,96 Triliun Rupiah lebih. Sektor pembentuk utama PDRB ADHK pada Tahun 2012 adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian pada Tahun 2012 mencapai 22,79% atau sebesar 447,5 Milyar Rupiah lebih, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 432 Milyar Rupiah lebih atau 23,11%, sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012 mencapai 496 Milyar Rupiah lebih, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 466 Milyar Rupiah lebih.

2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor yang mempunyai peranan yang cukup besar.

Laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui PDRB Kabupaten Lombok Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama tahun 2010-2012 mengalami naik turun secara dinamis, pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 5,58%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun adalah 5,26%, sektor pertambangan memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan paling tinggi mencapai 8,63% sedangkan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan terendah yakni 2,32%.

Tabel 2.4

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2012

No	Sektor	Laju Pertumbuhan Tahun (%)			Rata-Rata
		2010	2011*)	2012 **)	
1	2	5	6	7	8
1	Pertanian	2.05	2.19	3.77	2.32
2	Pertambangan dan Penggalian	6.91	12.83	6.20	8.63
3	Industri Pengolahan	3.24	4.64	4.73	5.41
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.04	7.70	5.77	7.50
5	Bangunan	8.68	9.75	7.09	7.87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.75	7.36	5.96	6.53
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.52	6.00	4.54	4.80
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.55	7.06	5.52	6.19
9	Jasa-Jasa	3.74	3.00	4.62	5.30
	PDRB	4.78	5.58	5.16	5.26

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah disusun target Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 72.580.907.664,72 atau 7,65% dari target semula yaitu Rp. 948.766.925.645,40 sehingga menjadi Rp. 1.021.347.833.310,12. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya perubahan pada komponen-komponen pendapatan yang meliputi :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, pada APBD Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp. 121.539.840.910,36, mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.372.466.523,72 atau 2,77% sehingga menjadi Rp. 124.912.307.434,08. Komponen-komponen yang mengalami perubahan pada pos PAD adalah :
 - a. Hasil Pajak Daerah, semula ditargetkan Rp. 61.117.587.216,70 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 atau 2,86% sehingga menjadi Rp. 62.867.587.216,70 yang bersumber dari penambahan BPHTB sebesar Rp. 1.750.000.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 23.935.818.408,60 mengalami peningkatan sebesar Rp. 285.000.000,00 atau 1,19% sehingga menjadi Rp. 24.220.818.408,60 yang bersumber dari Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya sebesar Rp. 285.000.000,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, semula ditargetkan sebesar Rp. 11.665.479.696,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.433.541.774,00 atau 12,29% sehingga menjadi Rp. 10.231.937.922,00 yang disebabkan oleh :
 - 1) Pengurangan Deviden dari PDAM sebesar Rp. 570.908.714,00
 - 2) Pengurangan Deviden dari PT. Bank NTB sebesar Rp. 1.156.091.084,00.
 - 3) Penambahan Deviden BPR-LKP sebesar Rp. 160.592.974,00.



- 4) Penambahan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Bantuan Koperasi sebesar Rp. 132.865.050,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, semula ditargetkan sebesar Rp. 24.820.955.589,06 mengalami peningkatan Rp. 2.771.008.297,72 atau 11,16% sehingga menjadi Rp. 27.591.963.886,78 yang bersumber dari :
- 1) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,00.
 - 2) Pengembalian dari kelebihan uang muka 275.167.300,00.
 - 3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp. 1.218.782.148,72.
 - 4) Penambahan TPTGR dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Rp. 777.058.849,00
- 2. Dana Perimbangan**, semula ditargetkan sebesar Rp. 727.145.262.721,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.629.321.473,00 atau 0,36% sehingga menjadi Rp. 724.515.941.248,00. Perubahan target ini disebabkan oleh :
- a. Berkurangnya pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 2.629.321.473,00 dari target semula sebesar Rp. 37.529.862.721,00 menjadi Rp. 34.900.541.248,00.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, semula ditargetkan sebesar Rp. 100.081.822.014,04 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.837.762.614,00 atau 71,78% menjadi Rp. 171.919.584.628,04.
- Perubahan target tersebut disebabkan karena bertambahnya :
- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 5.053.623.800,00 atau 195,06% dari target semula sebesar Rp. 2.590.795.828,04 sehingga menjadi Rp. 7.644.419.628,04. Dengan rincian sebagai berikut :
 - penambahan Hibah PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,00

- penambahan Hibah Pertamina sebesar Rp. 53.623.800,00.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 8.484.455.814,00.
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 29.999.683.000,00 yang bersumber dari dana penyesuaian pada bidang pendidikan.
- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 28.300.000.000,00.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang lebih akuntabel, efisien dan efektif, APBD Tahun Anggaran 2013 mengalami perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan tersebut terjadi baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Perubahan terhadap belanja tidak langsung terjadi pada komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sementara itu, untuk belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan. Belanja langsung mengalami perubahan pada komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 958.953.395.310,40 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.810.088.306,50 atau 7,49% sehingga menjadi Rp. 1.030.763.483.616,90. Perubahan pada Belanja Daerah secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 39.231.165.845,77 atau 6,24% dari target semula Rp. 628.368.634.618,44 menjadi Rp. 667.599.800.464,21, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai semula dianggarkan sebesar Rp. 547.216.470.582,44 mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.201.706.722,77 atau 5,34% sehingga menjadi Rp. 576.418.177.305,21 Peningkatan pada belanja pegawai ini disebabkan oleh :

- a. Rasionalisasi gaji sebesar Rp. 6,150,804,177.23
- b. Sertifikasi Guru sebesar Rp. 35,168,600,958.00

2. Belanja Bunga

Belanja Bunga semula dianggarkan sebesar Rp. 427.821.018,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 61.940.877,00 atau 14,48% sehingga menjadi Rp. 365.880.141,00.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp. 24.818.096.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.570.000.000,00 atau 34,53% sehingga menjadi Rp. 33.388.096.000,00.

4. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp. 11.852.647.018,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 245.000.000,00 atau 2,07% sehingga menjadi Rp. 12.097.647.018,00

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula ditargetkan sebesar Rp. 41.198.600.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.276.400.000,00 atau 5,53% sehingga menjadi Rp. 43.475.000.000,00

6. Belanja Tak Terduga semula dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 50% sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,00

7. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tidak mengalami perubahan.

2.3.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.578.922.460,73 atau 9,85% dari target semula Rp. 330.584.760.691,96 menjadi Rp. 363.163.683.152,69, yang bersumber dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai semula dianggarkan Rp. 29.625.219.187,00 bertambah sebesar Rp. 205.589.238,01 atau 0,69% menjadi Rp. 29.830.808.425,04.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa semula dianggarkan sebesar Rp. 137.800.699.443,95 mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.095.224.493,88 atau 9,50% menjadi Rp. 150.895.923.937,83.

3. Belanja Modal

Belanja Modal semula dianggarkan sebesar Rp. 163.158.842.060,98 mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.278.108.728,84.

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 mengalami perubahan pada komponen penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.738.855.623,78 atau 23,52% dari target semula sebesar Rp. 20.150.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 24.888.855.623,78. Kondisi ini disebabkan karena :

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, semula diasumsikan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp. 4.738.855.623,78 atau 23,69% sehingga menjadi Rp. 24.738.855.623,78 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013.

- 2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00.

2.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.509.674.982,00 atau 55,30% dari target semula sebesar Rp. 9.963.530.335,00 sehingga menjadi Rp. 15.473.205.317,00. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut terjadi pada komponen sebagai berikut :

- a) Penyertaan Modal sebesar Rp. 9.288.523.750,00
b) Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 6.184.681.567,00

Secara lebih rinci struktur Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Struktur Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2013

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Persentase
		APBD 2013	APBD P 2013		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	948,766,925,645.40	1,021,347,833,310.12	72,580,907,664.72	7.65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121,539,840,910.36	124,912,307,434.08	3,372,466,523.72	2.77
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	61,117,587,216.70	62,867,587,216.70	1,750,000,000.00	2.86
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	23,935,818,408.60	24,220,818,408.60	285,000,000.00	1.19
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,665,479,696.00	10,231,937,922.00	(1,433,541,774.00)	(12.29)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24,820,955,589.06	27,591,963,886.78	2,771,008,297.72	11.16
4.2.	DANA PERIMBANGAN	727,145,262,721.00	724,515,941,248.00	(2,629,321,473.00)	(0.36)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37,529,862,721.00	34,900,541,248.00	(2,629,321,473.00)	(7.01)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	612,621,760,000.00	612,621,760,000.00	-	0.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	76,993,640,000.00	76,993,640,000.00	-	0.00



NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Persentase
		APBD 2013	APBD P 2013		
1	2	3	4	5	6
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100,081,822,014.04	171,919,584,628.04	71,837,762,614.00	71.78
4.3.1	Pendapatan Hibah	2,590,795,828.04	7,644,419,628.04	5,053,623,800.00	195.06
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21,966,843,186.00	30,451,299,000.00	8,484,455,814.00	38.62
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	75,524,183,000.00	105,523,866,000.00	29,999,683,000.00	39.72
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	28,300,000,000.00	28,300,000,000.00	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	948,766,925,645.40	1,021,347,833,310.12	72,580,907,664.72	7.65
5.	BELANJA DAERAH	958,953,395,310.40	1,030,763,483,616.90	71,810,088,306.50	7.49
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	628,368,634,618.44	667,599,800,464.21	39,231,165,845.77	6.24
5.1.1.	Belanja Pegawai	547,216,470,582.44	576,418,177,305.21	29,201,706,722.77	5.34
5.1.2.	Belanja Bunga	427,821,018.00	365,880,141.00	(61,940,877.00)	(14.48)
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	24,818,096,000.00	33,388,096,000.00	8,570,000,000.00	34.53
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	11,852,647,018.00	12,097,647,018.00	245,000,000.00	2.07
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	855,000,000.00	855,000,000.00	-	0.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	41,198,600,000.00	43,475,000,000.00	2,276,400,000.00	5.53
5.1.8.	Belanja Tak Terduga	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	(50.00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	330,584,760,691.96	363,163,683,152.69	32,578,922,460.73	9.85
5.2.1.	Belanja Pegawai	29,625,219,187.03	29,830,808,425	205,589,238.01	0.69
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137,800,699,443.95	150,895,923,937.83	13,095,224,493.88	9.50
5.2.3.	Belanja Modal	163,158,842,060.98	182,436,950,789.82	19,278,108,728.84	11.82
	JUMLAH BELANJA	958,953,395,310.40	1,030,763,483,616.90	71,810,088,306.50	7.49



NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Persentase
		APBD 2013	APBD P 2013		
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10,186,469,665.00)	(9,415,650,306.78)	770,819,358.22	(7.57)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	10,186,469,665.00	9,415,650,306.78	(770,819,358.22)	(7.57)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20,150,000,000.00	24,888,855,623.78	4,738,855,623.78	23.52
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	20,000,000,000.00	24,738,855,623.78	4,738,855,623.78	23.69
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150,000,000.00	150,000,000.00	-	0.00
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.1.7	BPR-LKP	-	-	-	-
6.19	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,150,000,000.00	24,888,855,623.78	4,738,855,623.78	23.52
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,963,530,335.00	15,473,205,317.00	5,509,674,982.00	55.30
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,262,122,824.00	9,288,523,750.00	5,026,400,926.00	117.93
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	5,701,407,511.00	6,184,681,567.00	483,274,056.00	8.48
6.29.	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9,963,530,335.00	15,473,205,317.00	5,509,674,982.00	55.30
6.3	PEMBIAYAAN NETO	10,186,469,665.00	9,415,650,306.78	(770,819,358.22)	(7.57)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	-

Sumber data : DPPKD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013